

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan memberikan penjelasan secara umum, tentang masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan kerangka penulisan.

A. Latar Belakang Permasalahan

Kebebasan dan kemerdekaan selalu menjadi hal yang diperbincangkan dan diperjuangkan oleh manusia, karena pada hakekatnya dalam diri manusia selalu terdapat keinginan untuk dapat melakukan kehendaknya tanpa adanya suatu tekanan atau paksaan dari pihak lain, yang dianggap akan menghalangi kebebasan kehendak tersebut.¹ Tuntutan kemerdekaan dari berbagai bangsa, suku, ataupun etnis banyak terjadi, hal ini menjadi sebuah topik menarik untuk dikaji oleh para ahli tata negara, mengenai faktor apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya, padahal pihak yang meneriakkan kemerdekaan itu merupakan bagian dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat.²

Pada umumnya, pihak-pihak yang menginginkan kemerdekaan tersebut, adalah pihak-pihak yang merupakan golongan minoritas atau suatu etnik atau sebagian penduduk di suatu negara yang merasa diperlakukan secara tidak adil

¹ http://wrks.itb.ac.id/app/images/files_produk_hukum/uud_45.pdf. Diakses 17 April 2013

² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17630/4/Chapter%201.pdf>.
Diakses 17 April 2013

oleh pemerintah yang berkuasa.³ Pada umumnya wilayah yang menginginkan kemerdekaan, terdapat gerakan pembebasan yang merupakan cerminan dari sebagian ataupun keseluruhan dari rakyat di wilayah tersebut. Tuntutan yang paling sering terdengar adalah, pembentukan suatu negara baru dengan cara melakukan pemisahan dari negara asalnya.⁴

Masyarakat ataupun rakyat, memiliki legitimasi secara Hukum Internasional untuk mendapatkan kemerdekaan, seperti tercermin dalam piagam PBB. Jaminan terhadap hak asasi manusia atas kemerdekaan individu dan suatu bangsa, yang lebih dikenal dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*), yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu, ialah hak setiap bangsa dan individu dan tidak ada suatu pihak pun yang dibenarkan untuk menghalangi, ataupun mengganggu usaha-usaha dari suatu bangsa untuk memerdekakan diri. Namun, hak ini menjadi suatu polemik, disebabkan oleh adanya suatu friksi antara keinginan dari suatu pihak atau bangsa, yang pada mulanya merupakan bagian dari suatu negara yang berdaulat untuk memerdekakan diri, dengan peranan dan kedudukan dari kedaulatan negara induknya.⁵

Jaminan terhadap hak asasi manusia, atas kemerdekaan individu dan suatu bangsa, yang lebih dikenal dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*), secara tegas diakui dalam *Convenant on Civil and Political Rights* (1966) dan *Convenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966). Hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) telah menjadi prinsip dasar

³*Loc Cit.* Diakses 17 April 2013.

⁴*Loc Cit.* Diakses 17 April 2013.

⁵*Loc Cit.* Diakses 17 April 2013.

Hukum Internasional umum, yang diterima dan diakui sebagai suatu norma yang mengikat dalam masyarakat internasional, yang sering disebut dengan *Jus Cogens*. Prinsip ini membatasi kehendak bebas negara, dalam menangani masalah gerakan separatis yang terjadi di wilayahnya dengan tetap mengacu pada kaidah Hukum Internasional, yang mengancam invaliditas setiap persetujuan-persetujuan, ataupun aturan dan cara-cara yang ditempuh negara yang bertentangan dengan Hukum Internasional, karena penentuan nasib sendiri diakui oleh masyarakat internasional, sebagai hak asasi yang harus dihormati.

Menurut Hukum Internasional, terdapat suatu asas yang telah diterima oleh semua negara, bahwa kejadian-kejadian dalam suatu negara adalah urusan intern negara tersebut dan pihak-pihak asing tidak berhak turut campur. Tetapi adakalanya di dalam suatu negara, terjadi pemberontakan atau gerakan separatis dan gerakan itu telah mencapai suatu keadaan tertentu, sehingga negara-negara lain tidak boleh begitu saja mengabaikan keadaan-keadaan tersebut. Oleh karena itu negara-negara lain kemungkinan dapat memberikan perhatian dengan cara-cara tertentu.⁶

Salah satu isu yang terkait dengan tuntutan untuk memerdekakan diri dan lepas dari suatu wilayah kedaulatan negara adalah konflik Tibet. Tibet adalah suatu kawasan yang tertutup dan mandiri, yang berada di pegunungan Himalaya. Mayoritas penduduk Tibet beragama Budha yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualnya. Dalai Lama adalah sosok yang mewakili sisi spiritual dari

⁶*Lo. Cit*, Diakses 17 April 2013.

kehidupan di Tibet. Oleh sebab itu, Tibet banyak diidentifikasi dengan Dalai Lama dalam menyikapi masalah dunia.

Konflik antara China dan Tibet telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, kembali mencuat ketika memasuki rezim Mao Zedong, tokoh pendiri Partai Komunis China (PKC) yang menjadi penguasa China di era pemerintahan Republik. Perang sipil di China dimenangkan oleh partai komunis China (PKC), Mao Zedong dan para pemimpin PKC mempersiapkan tindakan untuk menyerang Tibet. Mereka menyatakan, tujuan penyerangan yang dilakukan China terhadap Tibet, dilakukan untuk menyelamatkan Tibet kecil yang miskin dari imperialis Barat. Namun, para Tibeitan tidak menerima serangan yang dilakukan prajurit China, karena mereka merasa tidak pernah mendapat bantuan dari kaum imperialis atau dari manapun.⁷

Dalam penyerangan tersebut, China berhasil menduduki Lhasa pada tahun 1950. Bagsa Tibet telah diambil alih oleh pasukan bersenjata China dan diklaim sebagai bagian dari China. Setelah melakukan beberapa kompromi Dalai lama mau mengakui kedaulatan China dengan syarat sektor ekonomi dan politik tetap dijalankan secara feodal. Dalam kondisi di bawah tekanan militer China, Tibet tidak memiliki sarana untuk melawan, baik secara militer maupun upaya meminta bantuan dari masyarakat internasional.⁸

Massa di Tibet menginginkan secepatnya China pergi dari Tibet. Melihat kondisi ini, Dalai Lama berusaha menuntut China dan segera merumuskan kemerdekaan Tibet. Namun, upaya yang dilakukan Dalai Lama tersebut sia-sia,

⁷Lowell Thomas JR.1961.*Tibet Api dalam Sekam*. Jakarta hal 12 dikutip dalam *Loc cit.*. Diakses 19 April 2013.

⁸*Loc. cit.*, 19 April 2013.

karena pertempuran antara kedua belah pihak telah terjadi. Pada tanggal 10 Maret 1959 pemberontakan meletus di Lhasa karena tersebar isu China berencana menculik Dalai Lama. Keadaan ini membuat Dalai lama mengambil keputusan untuk meninggalkan Lhasa pada 17 Maret 1959 dan pergi ke India untuk meminta simpati Internasional atas apa yang dialami rakyatnya. Setelah kepergian Dalai Lama ke pengasingan banyak masyarakat China yang mengungsi dan bertempat tinggal di Tibet. Sehingga orang-orang Tibet berjumlah lebih sedikit dari orang-orang China di Tibet.⁹ Pasca berakhirnya rezim Mao Zedong, konflik China dan Tibet yang dipicu oleh aksi invasi China terhadap wilayah Tibet dengan propagandanya untuk melepaskan Tibet dari tirani pemerintahan feodal Dalai Lama, seolah tidak ada jalan penyelesaian yang konstruktif dan terus berlangsung sampai saat ini.

Pada Maret 2008, pada persiapan *Olimpiade Beijing*, rakyat Tibet melakukan unjukrasa besar-besaran, atas penolakan kesepakatan Rencana Pembebasan Damai Tibet dan aksi para biksu Tibet untuk menggelar aksi damai memperingati kegagalan pemerintah China menundukkan Tibet, serta pengusiran Dalai Lama ke pengungsian di tahun 1959.¹⁰ Dalam aksi penggalangan tuntutan ini, kurang lebih 300 biarawan atau rahib berbaris di pusat kota Lhasa. Aksi ini menewaskan 22 orang. Masyarakat Tibet merasa gerakan China untuk menekan Tibet, semakin kuat semenjak China menjadi raksasa ekonomi Asia. China membatasi gerak-gerik bangsa Tibet seperti melarang penggunaan bahasa asli

⁹Nurani Soyomukti.2008. *Revolusi Tibet : Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan Tibet-China-Amerika Serikat*. Jogjakarta : Garasi, hal 57-58

¹⁰Revolusi Tibet.

<http://id.shvoong.com/books/1866289-revolusi-tibet/>. Diakses 03 November 2012.

Tibet dan memaksa menggunakan bahasa China, melarang untuk memperkenalkan budaya Tibet, kepada wisatawan yang datang ke Tibet dan masyarakat Tibet cenderung tidak mendapatkan perlindungan.

Seiring mencuatnya tuntutan masyarakat Tibet atas kemerdekaan bangsanya dari cengkerman dan klaim sepihak oleh Pemerintah China, konflik yang terjadi antara China dan Tibet telah menjadi isu Internasional, dan membuat banyak negara memberikan perhatian terhadap konflik ini. Salah satu negara besar yang memberikan perhatiannya dan mengecam China untuk menghentikan invasi ke Tibet dan memberikan kemerdekaan pada Tibet yaitu India. India mengatakan bahwa invasi China ke Tibet tahun 1950, tidak bisa disebut sah karena melanggar hukum internasional atas penguasaan suatu wilayah, sehingga kependudukan China di Tibet dan klaim Chiina atas Tibet tidak dapa diakui. Bahkan status Tibet hingga kini masih merupakan wilayah independen. Dengan status yang dimiliki Tibet ini, Tibet memiliki hak untuk lepas dari China dan membentuk negara yang independen.¹¹ Terlebih dengan adanya isu pelanggaran HAM yang dilakukan China terhadap rakyat Tibet, menambah perhatian negara asing untuk mendukung keinginan Tibet menjadi negara yang independen dan menegakkan hak-haknya. Anggapan india tersebut, didukung dan dibenarkan oleh negara besar lainnya, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Dukungan kaum ekonom Inggris, sangat berpengaruh terhadap pandangan Barat yang menyatakn bahwa setelah mempertahankan kemerdekaan penuh dari China, tahun 1912, Tibet memiliki klaim kuat untuk dianggap sebagai negara merdeka. Dukungan dari Amerika dan

¹¹ [Http://tibet.net/wp-content/uploads/2011/08/Demili00.pdf](http://tibet.net/wp-content/uploads/2011/08/Demili00.pdf). Diakses 20 April 2013.

Inggris terhadap kemerdekaan Tibet, sangat bergantung pada kebijakan India atas Tibet, dan Amerika Serikat dan Inggris akan memperluas pengakuan diplomatik secara resmi terhadap kemerdekaan Tibet.

Negara Barat saat ini menggunakan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China ke Tibet, media Barat telah berulang kali mengangkat isu pelanggaran hak-hak adat masyarakat Tibet Dalam konflik China-Tibet, melalui media, China ditempatkan sebagai tertuduh oleh banyak pihak, hingga banyak wacana mengenai kasus China dan Tibet yang terus berkembang dengan berbagai sudut pandang. Banyak negara yang berpartisipasi untuk membantu Tibet dalam menyelesaikan konflik ini. Partisipasi dari dunia internasional adalah salah satu hasil dari perjalanan Dalai Lama ke negara-negara Barat. Negara-negara itu pada umumnya mengecam dan mendesak China untuk secepatnya menyelesaikan konfliknya dengan Tibet. Kecaman ini dilakukan dengan melihat status Tibet, ketika Tibet mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1913 dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan konferensi di Simla pada tahun 1914 tentang kemerdekaan Tibet.¹² Konferensi Simla disepakati menjadi satu tripartit, dimana orang-orang Tibet adalah mitra dalam pembicaraan dengan China dan Inggris.

Ketika hal ini terjadi, China kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengakuan internasional terkait wilayah Tibet sebagai bagian dari kedaulatan China dalam hukum internasional. Tibet tetap diakui sebagai wilayah fungsional yang independen, yang tercermin dari partisipasi pemerintah Tibet yang terlibat

¹² <http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP26.pdf>. Diakses 17 April 2013.

secara aktif dalam perundingan wilayah perbatasan, dan tidak ada perjanjian yang menyetujui untuk menerima hak kedaulatan China.

Kecaman dan intervensi negara-negara Asing, dirasa oleh pemerintah China sebagai ancaman bagi keinginan China untuk tetap mempertahankan Tibet sebagai wilayah teritorinya. Sehingga, pemerintah China mengecam perilaku negara-negara asing yang melakukan intervensi atas masalah Tibet. Kecaman tersebut salah satunya yaitu, mengecam negara-negara yang menerima kedatangan Dalai Lama, seperti Amerika dan Australia, meminta pihak terkait untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri China. dan menggunakan peran strategis China dalam dunia internasional, untuk menekan intervensi dan mengurangi ancaman dunia internasional terhadap masalah Tibet.

Isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara asing, khususnya Amerika Serikat ini, merupakan tindakan penekanan kepada China terhadap masalah Tibet dan merupakan upaya mendukung Tibet dalam pemisahan diri dari China. Pemerintah China tidak menyetujui penggunaan masalah hak asasi manusia yang digunakan oleh negara Barat untuk mencampuri urusan dalam negeri China.¹³ Bagi China, segala bentuk intervensi asing dalam masalah Tibet, menjadi sebuah ancaman serius terkait dengan klaim sepihak China, bahwa Tibet merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan China dan menegaskan kepada masyarakat internasional bahwa konflik Tibet merupakan urusan internal dan tidak akan mentolerir segala bentuk intervensi asing.

¹³ Kompas. 7 Februari 1992. Hal 9.

Hingga kini masalah antara China dan Tibet, belum juga mendapatkan titik terangnya. Dalai Lama dan para pelarian di pemerintahan pengasingan, terus menyerukan agar pemerintah China memberikan kemerdekaan kepada Tibet. Ini dilakukan, karena ketidakpuasan rakyat Tibet atas kebijakan-kebijakan pemerintah China pada Tibet. Mereka yakin bahwasanya Tibet berhak mendapatkan kemerdekaan tersebut dan berhak lepas dari China. Dengan segala kekayaan alam yang mereka miliki dan bentuk pemerintahan Dalai Lama, mereka dapat menjamin bahwa, Tibet mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Namun, pemerintah China masih tetap bersikeras mempertahankan Tibet sebagai wilayah teritorinya dan menolak keinginan Tibet untuk menjadi negara yang independen, meskipun dengan adanya tekanan dari dunia internasional.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan pemerintah China tetap mempertahankan Tibet sebagai wilayah teritorinya.
2. Memberikan gambaran tentang konflik yang terjadi antara China dan Tibet.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan suatu pokok permasalahan, yaitu: *Mengapa China tidak memperdulikan tekanan dunia internasional terhadap masalah Tibet?*

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai masalah ini, penulis akan menggunakan teori pembuatan kebijakan politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional.

TEORI PEMBUATAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kebijakan politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara, dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.¹⁴

Sedangkan menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri adalah kondisi politik dalam negeri, yang merupakan faktor pembawa dampak besar bagi politik luar negeri. Sebelum mengadakan serangkaian tindakan dalam hubungan luar negerinya, suatu negara terlebih dahulu harus menentukan pola politik luar negerinya berdasarkan atas kebutuhan nasional, sehingga kepentingan nasional berperan sebagai kontrol dalam setiap pelaksanaan politik luar negerinya. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya.

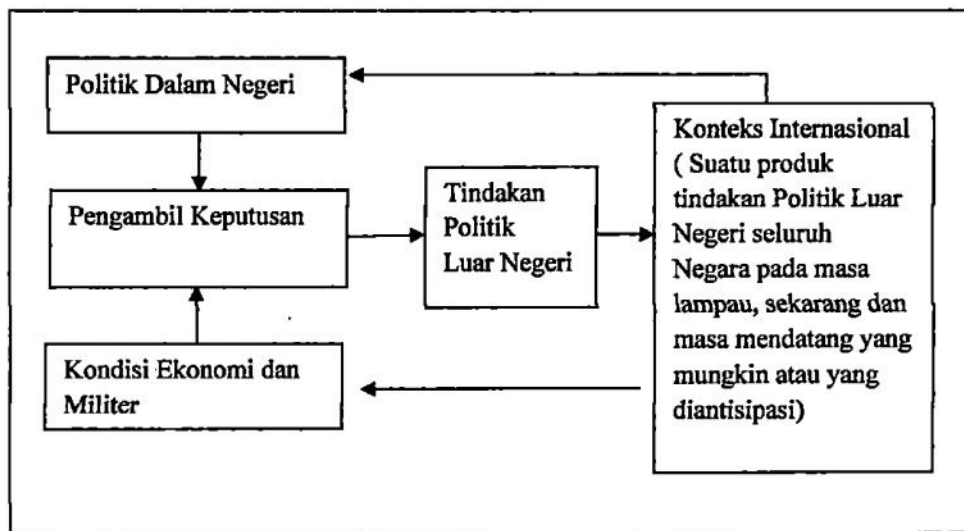
Politik Internasional merupakan interaksi dari politik luar negeri, yaitu suatu kajian pokok (*core subject*) dalam kajian Hubungan Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan dan

¹⁴Jack C. Plano dan Roy Olton. *The International Dictionary*, USA, terjemahan Wawan Juanda Abardin. 1996. Hal 5.

kekuasaan. Politik Internasional bisa dipandang sebagai *output* dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Tiga pertimbangan tersebut yakni: (1) Kondisi politik dalam negeri, (2) Kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer, (3) Konteks Internasional, yaitu posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional itu.¹⁵ Menurut William D. Coplin, gambar dibawah ini dapat menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang telah disebutkan di atas saling berinteraksi sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri.

Gambar 1

Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri oleh William D. Coplin.



William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis*. Edisi Kedua (terjemahan M. Marbun), CV Sinar BARU, Bandung 1992

¹⁵William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis*, Edisi Kedua ung 1992. Hal 30.

Menurut gambar diatas, politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan para aktor-aktor dalam mengambil keputusan, dimana terdapat kepentingan, baik itu murni kepentingan negara atau kepentingan pribadi dari pengambil keputusan.

1. Faktor Politik Dalam Negeri

Menurut William D. Coplin, peran politik dalam negeri yang turut memberikan pengaruh dalam penyusunan politik luar negeri atau disebut dengan *policy influencers*, dibedakan menjadi empat tipe, yaitu: *partisan*, *Bureaucratic*, *Interest* dan *mass influencers*.¹⁶

a. *Partisan Influencers*

Partisan Influencers ini bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan, yaitu tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. *Influencers* ini berupaya untuk mempengaruhi kebijakan, dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel-personel yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan.

Influencers ini dipandang sebagai informasi dua arah dan mempengaruhi saluran di antara para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat. *Partisan influencers* biasanya lebih banyak memfokuskan pada kebijakan dalam

¹⁶*Ibid.* Hal. 82

negeri, namun juga tidak mengabaikan kebijakan luar negeri terutama apabila kebijakan luar negeri tersebut memberi pengaruh dalam negeri.

b. *Bureaucratic Influencers* (birokrat yang mempengaruhi)

Istilah *Bureaucratic Influencers* ini, digunakan untuk menunjukkan kepada individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah, yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan.¹⁷

Kelompok-kelompok birokratis ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan, karena kelompok-kelompok ini, menyalurkan informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan.

c. *Interest Influencers* (kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Influencers terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari *Policy Influencers* atau pengambil keputusan yang lain. Umumnya kepentingan ini bersifat ekonomis karena orang-orang sering dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif melalui persamaan kepentingan ekonomi.¹⁸

Kepentingan-kepentingan yang bersifat non-ekonomis juga bisa digunakan sebagai dasar tindakan kolektif, terutama apabila ada ikatan-ikatan etnis atau geografis di antara mereka. *Interest Influencers* merupakan faktor yang penting

¹⁷*Ibid.* Hal. 82

¹⁸*Ibid.* Hal. 87

dalam penyusunan politik luar negeri, karena mereka mempengaruhi kompleksitas proses politik dalam negeri.¹⁹

d. *Mass Influencers*

Opini publik atau *mass influencers* lebih mengacu pada opini yang dimiliki oleh rakyat yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan, pada saat menyusun politik luar negeri. Opini publik digunakan oleh pengambil keputusan dan *Policy Influencers* lainnya, seolah-olah sekedar suatu kekuatan yang mengarahkan para pengambil keputusan. Para pejabat menggunakan opini publik untuk merasionalisasi tindakan - tindakan politik luar negeri, bukan untuk membentuk kebijakan.

2. Faktor Ekonomi dan Militer

Pengambil keputusan luar negeri juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan militer, serta memperhatikan kelemahan negara dalam penyusunan politik luar negeri. Dalam rangka mengambil kebijakan luar negeri, harus melihat dahulu kekuatan ekonomi dan militer sebuah negara, karena ekonomi dan militer merupakan isu yang sangat penting bagi suatu negara untuk berdiplomasi dengan baik. Para pembuat keputusan luar negeri, harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer.²⁰

Secara historis, faktor-faktor ekonomi dan militer saling berkaitan dengan pembentukan politik luar negeri suatu negara. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan militer acapkali digunakan suatu negara dalam proses tawar-menawar dalam

¹⁹*Ibid.* Hal. 88

²⁰*Ibid* Hal. 110

politik internasional. Terlebih dewasa ini kekuatan militer dan ekonomi, menjadi nilai lebih guna meraih citra bagi sebuah negara di mata internasional.

3. Faktor Konteks Internasional

Secara tradisional, para analis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu, menentukan bagaimana negara akan berperilaku. Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa, setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Kepentingan nasional ini adalah faktor penentu dalam politik luar negeri suatu negara. Kondisi internasional sebagai suatu perangkat faktor yang mempengaruhi aktivitas politik luar negeri negara.

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Geografi masih memainkan peran politik luar negeri yang penting, meskipun bukan peran terpenting seperti di masa lalu, beberapa kondisi geografis masih merupakan bagian yang konstan dari keputusan politik luar negeri.²¹ Selain faktor geografis, faktor hubungan ekonomi juga merupakan bagian yang penting dalam konteks internasional. Baik arus barang dan jasa maupun arus modal, membuat sebagian negara-negara tertentu bergantung terhadap negara lainnya. Terakhir adalah hubungan politik dengan negara -negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara.

²¹*ibid.* Hal. 167

Dalam proses pengambilan keputusan luar negeri China, terdapat aktor-aktor yang terlibat dan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri China yaitu: Partai Komunis China, Dewan Negara dan Tentara Pembebasan Rakyat.

Berpegang pada salah satu lima prinsip koeksistensi damai China yaitu, saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, tidak saling ikut campur terhadap urusan internal masing-masing negara, sehingga China tidak menghendaki intervensi dunia internasional terhadap masalah domestik yang terjadi antara China dan Tibet, karena Pemerintah China menganggap bahwa masalah Tibet merupakan masalah dalam negeri China.

KEPENTINGAN NASIONAL

Konsep ini merupakan tujuan mendasar, serta faktor yang paling menentukan para pembuat keputusan, dalam merumuskan politik luar negerinya. Definisi kepentingan nasional secara umum dipaparkan oleh J. Frankel, bahwa kepentingan nasional merupakan aspirasi-aspirasi negara, yang diterapkan dalam kebijaksanaan dan program-program aktual dan dapat digunakan untuk menerangkan, merasionalisasikan dan mengkritik persengketaan-persengketaan atau pertengkaratan argumen politik.²²

Sedangkan definisi kepentingan nasional menurut Jack. C Plano dan Roy Olton yaitu: "*National interest is the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy.*"

²²Joseph, Frankel. *International Relation in Changing World*. New York; Oxford University Press, 1998. Hal.86.

*The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. These include self-preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.*²³

Definisi kepentingan nasional di atas dapat diartikan, bahwa kepentingan nasional adalah, tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan dan menjadi panduan bagi para pembuat keputusan, dalam merumuskan politik luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Dari definisi ini, ada tiga hal dari lima unsur yang menjadi kebutuhan hidup bagi negara, yaitu: keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Logika mengenai konflik China dengan Tibet, bisa dipahami dengan menempatkan diri pada perspektif China, yang mengangkat isu nasionalisme dan integritas serta kedaulatan negara. China merupakan negara yang besar dan sangat berpengaruh di dunia internasional. Sistem pemerintahan China yaitu menggunakan dasar ajaran Marxisme Lenin, sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan terpusat, untuk mengatur seluruh daerah yang berada dalam batas wilayahnya. China juga menerapkan sistem nasionalisme terhadap negaranya.

²³Plano & Olton. *Op.Cit.* Hal 128.

Dalam masalah Tibet, kepentingan China yang paling utama yaitu, faktor integritas teritorial atau faktor keutuhan wilayah. Seperti yang telah dijelaskan tentang klaim dan keyakinan pemerintah China, bahwa wilayah Tibet merupakan wilayah teritorialnya. Pemerintah China beranggapan bahwa, China mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah Tibet. Hal ini yang membuat pemerintah China, sangat menentang keinginan Tibet yang ingin menjadi negara yang independen. Tindakan rakyat Tibet tersebut, dapat menjadi ancaman bagi tercapainya kepentingan nasional China, khususnya pada sektor keutuhan wilayah.

Selain itu, kepentingan nasional China terhadap Tibet yaitu mengenai keamanan wilayah. Hal ini sangat berkaitan dengan letak geografis Tibet, yang berbatasan dengan negara-negara di selatan dan India, yang merupakan negara saingan China. Dengan letak geografis Tibet ini, menjadikan Tibet sebagai wilayah yang strategis sebagai zona penahan (*buffer zone*), untuk menghadapi negara tetangga tersebut dan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi pada negara tetangga tersebut.²⁴

Kepentingan nasional China yang ketiga yaitu pada bidang ekonomi. Beberapa pakar meramalkan bahwa China adalah salah satu negara yang akan bisa menduduki posisi negara adidaya, yang mampu menggantikan posisi Amerika Serikat melalui ekonominya. Bagi pemerintah China, penguasaan atas Tibet merupakan aset yang sangat berharga. Para ahli China memperkirakan bahwa di Tibet terdapat kandungan mineral yang berlimpah. Di daerah Tibet

²⁴Tiada Perdamaian di Shangri-La – Konflik China dan Tibet <http://absoluterevo.wordpress.com/2012/05/06/photo-eksekusi-mati-warga-tibet-oleh-tentara-china-warning-gruesome-photographs-viewer-discretion-advised/>. Diakses 21 November 2012.

Tengah dan Barat, terdapat kandungan mineral senilai US\$81,3 juta. Untuk itu, pemerintah China telah mengalokasikan investasi sebesar US\$1,2 miliar untuk mengembangkan sumber daya alam ini, pemerintah China juga telah membangun saluran pipa untuk meningkatkan eksploitasi minyak dan gas alam di Tibet.²⁵

Tibet memang merupakan gudang kekayaan alam, misalnya seperti: minyak, uranium, lithium, khrom, tembaga, boraks, dan besi yang merupakan salah satu aset ekonomi yang sangat penting bagi China. Terlebih lagi adanya pertambangan krom terpenting China yang terdapat di Tibet. Mengingat China jugatelah menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, industri-industrinya tentu sangat membutuhkan bahan bakar dan bahan mentah yang luar biasa banyak, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Tibet, sehinggalah diperkirakan Tibet mampu menyediakan sumber daya alam dalam jumlah melimpah. Tujuannya, agar China tak lagi menggantungkan kebutuhan minyaknya dari luar negeri, mengingat harga minyak dunia kian melonjak. Kekuatan ini, menempatkan China pada posisi sebagai negara yang sangat penting bagi dunia internasional. Sebab itu, Tibet juga mempunyai peranan yang penting bagi kesejahteraan ekonomi Chinadan kelangsungan hidup negara untuk jangka panjang.

²⁵Revolusi Tibet.

<http://id.shvoong.com/books/1866289-revolusi-tibet/>. Diakses 02 Januari 2013.

E. Hipotesis

China tetap mempertahankan Tibet sebagai wilayah teritorialnya ditengah tekanan dunia internasional untuk melepaskan Tibet dari wilayah kedaulatan China, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. China yang dikuasai oleh partai & birokrasi, mengklaim Tibet & kekayaan SDA-nya sebagai bagian integral China yang berdaulat dan tidak mentolerir pemisahan diri Tibet, agar tidak memicu separatis lebih lanjut & merupakan buffer zone dengan India.
2. Posisi dan peran strategis China dalam politik internasional.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian penulisan skripsi ini ditekankan pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Pada masa ini, rakyat Tibet melakukan pemberontakan dan perlawanan terus-menerus yang mampu menarik perhatian dunia internasional dan menyebabkan masalah ini semakin rumit dan sulit untuk memprediksi penyelesaian masalah antara China dan Tibet ini. Namun, untuk mendukung dan memperjelas penulisan ini, penulis akan menerangkan beberapa faktor-faktor tentang masalah ini, baik dari sejarah, konflik dan sebagainya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data dan

informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data yang dilakukan bersumber dari sejumlah buku, majalah, koran, jurnal, dan internet.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan, mengenai rangkuman singkat tentang permasalahan yang akan diteliti. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, tujuan penelitian, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan penulis dalam menyusun bab-bab selanjutnya.

Bab II berisikan tentang deskripsi dari konflik China dan Tibet, yang menggambarkan gambaran umum China dan Tibet dari sektor geografis, ekonomi, dan politik. Adanya pergeseran sistem pemerintahan di China dari nasionalis ke komunis, yang merupakan awal mula munculnya kelompok kontra pemerintah China, yang menimbulkan terjadinya konflik, salah satunya antara China dan Tibet, juga respon dunia internasional terhadap masalah ini.

Bab III berisikan upaya yang dilakukan pemerintah China dalam mempertahankan Tibet, untuk tetap menjadi wilayah teritorinya, yaitu memberikan kebijakan-kebijakan pada Tibet, antara lain pemberian otonomi khusus, imigrasi bangsa Han ke Tibet dan membuat standar hidup di Tibet menjadi lebih baik.

Bab IV merupakan pembahasan mengenai kekuasaan partai dan birokrasi dalam sistem pemerintahan China, yang menganggap bahwa Tibet merupakan wilayah kedaulatan China yang terintegrasi dan menjadi kepentingan nasional

yang harus diperjuangkan, juga peran strategis China dalam dunia internasional yang dapat menekan intervensi dunia internasional terhadap masalah China dan Tibet.

Bab V berisi kesimpulan dari bab satu hingga bab empat yang merupakan intisari dan penutup dari tulisan skripsi ini.